



**APRESIASI FESTIVAL NONDOI 2023,
SYAHRUDIN; TERUS DIPERCANTIK
SAMPAI MASUK AGENDA NASIONAL**



Foto: Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor (tengah berkacamata) saat melaksanakan salah satu prosesi pembukaan Festival Nondoio Adat Paser 2023, Rabu (18/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

APRESIASI FESTIVAL NONDOI 2023, SYAHRUDIN; TERUS DIPERCANTIK SAMPAI MASUK AGENDA NASIONAL

PPU - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor mengapresiasi gelaran Festival Nondoio Adat Paser 2023. Bahkan ia mendorong pergelaran ini masuk dalam kalender pariwisata Nasional.

Ia turut hadir dalam pembukaan festival masyarakat Adat Paser di PPU yang digelar di Rumah Adat Kuta Rekan Tatau, Rabu (18/10/2023). Syahrudin mengikuti seluruh penampilan seni dan budaya yang ditampilkan dalam acara tersebut.

Menurutnya, penyelenggaraan rutin tiap tahun ini merupakan hal penting yang sudah seharusnya ada. Baginya ini menjadi momentum untuk mempererat suku bangsa yang ada di Benuo Taka.

"Ini sudah menjadi agenda budaya rutin di kabupaten ini, yang memang sepatutnya ada sebagai perekat bangsa," ucapnya, Kamis (19/10/2023).

Festival Nondoio Adat Paser

2023 ini digelar oleh Pemkab PPU melalui Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Budpar) PPU bekerjasama dengan Lembaga Adat Paser (LAP) PPU. Diadakan selama 4 hari, dimulai pada 18 sampai 21 Oktober 2023.

Festival Nondoio kali ini ini bertema "Serapo Nusantara" yang berarti Serambi Nusantara. Tema ini selaras dengan keragaman masyarakat yang heterogen, gambaran geografis wilayah yang memiliki beragam potensi dan khasanah daerah.

Festival Nondoio adalah gelaran ritual adat yang dilaksanakan setiap tahun oleh suku Paser di PPU. Nondoio merupakan ritual bersih-bersih kampung yang sejak dulu dilakukan oleh leluhur suku Paser, agar diberikan keselamatan, kesejahteraan bagi masyarakat.

Sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka Festival Nondoio Adat Paser 2023 ini juga digelar antara lain ada parade budaya

festival kuliner nusantara, festival kuliner tradisional, festival seni dan budaya yang akan digelar setiap malam.

Ada juga pawai budaya, pameran UMKM yang diikuti oleh seluruh organisasi wanita dan pelaku UMKM di Kabupaten PPU dan sejumlah kegiatan lain yang akan ditampilkan di sana selama festival ini berlangsung.

Syahrudin menyebutkan festival ini ke depannya perlu terus ditingkatkan. Agar nantinya masuk sebagai event Nasional.

Oleh karena itu, Pemkab PPU melalui dinas terkait perlu untuk menempuh upaya serius dalam mendukung penyelenggaraannya. "Harapannya, kegiatan ini bisa mempercantik lagi kontennya. Karena saya melihatnya tadi, ada beberapa yang perlu penataan. Sehingga nanti ke depannya bisa lebih baik," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha Ratnasari



TEKAN INFLASI, DISPERINDAG KUKAR GELAR 128 TITIK OPERASI PASAR



**Hadapi IKN, Kecamatan Samboja Barat
Siapkan SDM dan Kawasan Pertanian**



Kepala Disperindag Kukar, Arfan Boma Pratama. (Ady/Radar Kukar)

TEKAN INFLASI, DISPERINDAG KUKAR GELAR 128 TITIK OPERASI PASAR

TENGGARONG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar), akan melakukan operasi pasar murah di 128 titik, yang tersebar di 20 kecamatan di Kukar. Akan terus dilakukan hingga Desember 2023 mendatang.

Awalnya, Kepala Disperindag Kukar, Arfan Boma Pratama, mengatakan pihaknya berencana melakukan operasi pasar murah di 300 titik. Namun rencana itu urung terlaksana, setelah pihaknya melakukan rapat koordinasi dan mendapati perubahan kebijakan dari Bulog. Sebagai salah satu mitra Disperindag dalam melakukan operasi pasar murah.

"Kita mengurangi target itu karena ada aturan baru dari pihak Bulog Samarinda. Setelah kita melaksanakan operasi pasar sebanyak 56 kali kemarin," katanya, Kamis (19/10/2023).

Boma menerangkan, sebelumnya subsidi biaya angkut yang harus dibayarkan

di seluruh wilayah di Kukar dipukul rata. Namun dengan aturan baru dari Bulog, mengharuskan biaya angkut barang tersebut disesuaikan dengan lokasi kegiatan. Sehingga jumlah titik operasi dilakukan penyesuaian.

Dalam operasi pasar kali ini, Boma juga mengatakan pihaknya menargetkan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit di akses. Salah satunya adalah Desa Jantur di Kecamatan Muara Muntai. Desa ini dipilih karena memiliki jumlah populasi penduduk yang terbilang besar, namun sulit diakses karena menuju Desa Jantur harus menggunakan jalur transportasi air.

"Kita akan berkerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, untuk melakukan operasi pasar di sana (Desa Jantur). Nanti kita angkut bahan pangan itu dengan model transportasi air," pungkasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Camat Samboja, Baharuddin. (Ady/Radar Kukar)

Hadapi IKN, Kecamatan Samboja Barat Siapkan SDM dan Kawasan Pertanian

TENGGARONG- Pemerintah Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Terus memupuk kesiapan jelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Beberapa sektor yang menjadi fokusnya, seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sektor pertanian.

Pembangunan SDM dilakukan agar, para pemuda dari Kecamatan Samboja Barat tidak tersisih ditengah derasnya persaingan saat IKN resmi dipindahkan. Sedangkan keputusan untuk mengembangkan sektor pertanian, dilakukan untuk turut menyukseskan ambisi Kukar menjadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan IKN.

Camat Samboja Barat, Burhanuddin, mengaku rutin berdialog dengan Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN. Dengan fokus pembahasan yang melingkupi pengembangan sektor pertanian hingga pembenahan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kami terus menyiapkan warga kami yang tergabung di Gabungan Kelompok

Tani (Gapoktan) ini bisa berkembang," kata Burhanuddin, Kamis (19/10/2023).

Burhanuddin menyoroti potensi timun di PPU yang sangat menjanjikan. Dalam satu bulan, para petani dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp 100 juta. Tak hanya itu, Kampung Lengkeng dan hidroponik estate sudah mendukung kebutuhan di Balikpapan.

Menyambut IKN, Burhanuddin menekankan peran Samboja Barat sebagai pilar ketahanan pangan. Dalam kerjasama ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar juga telah meluncurkan penelitian analisis sosial ekonomi masyarakat dibidang perkebunan, pertanian, dan kelautan.

"Ini memang kami dorong untuk membantu pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Karena kami masih terhambat dipengembangan dan pendekatan SDM yang terbatas," tutup Burhanuddin. (Adv)

Pemuli : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Camat Loa Kulu, Adriansyah. (Ady/Radar Kukar)

Jalan Rusak di Kecamatan Loa Kulu Segera Diperbaiki

TENGGARONG - Akses jalan yang merupakan penghubung utama roda perekonomian masyarakat, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kecamatan Loa Kulu. Pasalnya, sejumlah ruas jalan di Kecamatan Loa Kulu mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga sedang.

Camat Loa Kulu, Adriansyah, mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Pada sejumlah ruas jalan di Kecamatan Loa Kulu yang mengalami kerusakan. Perbaikan tersebut ditargetkan akan rampung pada akhir tahun ini.

Pengerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan tersebut, akan dilakukan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023. "Mulai 2022 kita usulkan, masuk di perubahan

2023 ini. Ada beberapa jalan yang sudah dalam perbaikan," ungkap Adriansyah, Kamis (19/10/2023).

Dia menyebut ada sekitar 3 kilometer (km) jalan rusak dari jalan poros menuju Desa Loh Sumber, jenis kerusakannya pun hanya berupa titik-titik tertentu saja. Kemudian, jalan dari Loa Kulu menuju Desa Jonggon Desa juga sudah mulus.

"Hanya spot-spot saja yang rusak, tapi sudah kita usulkan semua, PU yang tangani nanti. Kalau informasi PU tahun 2023 ini termasuk jalan lingkungan (diperbaiki)," sebutnya.

"Jonggon Desa itu sudah, tahun ini nyambung lagi sampai kantor desa, dan ada perbaikan jembatan di Batuk," tutupnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kepala Desa Sumber Sari, Sutarno. (Istimewa)

Desa Sumber Sari Fokus Kembangkan Wisata Alam dan Agrowisata

TENGGARONG - Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, memiliki segudang potensi untuk dikembangkan, termasuk juga disektor pariwisata. Potensi disektor wisata ini, kemudian menjadi fokus pengembangan Pemerintah Desa (Pemdes) Sumber Sari. Yakni pengembangan objek wisata alam dan agrowisata.

Kepala Desa Sumber Sari, Sutarno, mengungkapkan bahwa tujuan dari pengembangan tempat wisata ini adalah untuk memaksimalkan potensi di desa. Selain itu, untuk menarik wisatawan untuk datang ke Sumber Sari, yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kami saat ini tengah fokus pada dua spot wisata, yang pertama Wisata Puncak Bukit Biru yang terintegrasi dengan agrowisata di RT 9 Dusun Taman Arum, Desa Sumber Sari. Dan satu spot lagi pengembangan embung wisata yang ada di RT 8. Jadi dua tempat yang memang lagi kita upayakan dan tahun depan sudah bisa kita jual," ungkap Sutarno, Kamis (19/10/23).

Dari objek wisata puncak bukit biru, Sutarno mengatakan sudah dapat memberikan kontribusi ekonomi. Meski pemasukan hanya didapat dari pungutan untuk penitipan motor. Ia juga menambahkan, tahun ini Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar akan

memberikan bantuan berupa pembangunan gazebo.

"Kita dari Pemdes Sumber Sari juga menganggarkan tempat untuk kemping sudah kita kerjakan, serta ada pembuatan tangga naik ke puncak," katanya.

Sementara untuk wisata embung, saat ini sudah persiapan, jalan semenisasi sudah samapai ke atas dan sudah dibangun gazebo dan pada tahun ini akan kembali dilakukan tambahan untuk pembangunan sanitasi dan toilet.

Kemudian nantinya di embung akan dibuat wisata dengan konsep wisata alam dan agrowisata. Karena di bawah embung itu banyak petani yang menanam sayur dan airnya ngambil dari embung. Jadi itu juga yang akan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang di Desa Sumber Sari.

"Artinya pangsa pasarnya, kalau di wisata puncak itu kan anak-anak muda. Tapi kalau di wisata embung lebih dari kalangan muda sampai yang tua juga bisa. Kami berharap apa yang kami rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga ada dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat." tutupnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Ilustrasi mobil ambulans yang disalurkan Kecamatan Tenggarong. (Istimewa)

Penuhi Pelayanan Kesehatan Warga, Kecamatan Tenggarong Salurkan 5 Unit Ambulans

TENGGARONG- Pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat, jadi salah satu fokus pemerintah Kecamatan Tenggarong. Sebanyak empat unit mobil ambulans dan 1 unit mobil jenazah belum lama ini diserahkan kepada desa dan kelurahan.

Camat Tenggarong, Sukono, menjelaskan bahwa dari lima unit kendaraan tersebut, salah satunya adalah mobil jenazah yang diserahkan ke Desa Rapak Lambur. Keputusan ini diambil karena Desa Rapak Lambur memiliki lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang cukup jauh dari pemukiman warga.

"Dengan adanya mobil jenazah, diharapkan pelayanan pemakaman menjadi lebih baik dan efisien," kata Sukono, Kamis (19/10/2023).

Sementara, empat unit mobil ambulans lainnya diserahkan kepada Kelurahan Loa Tebu, Kelurahan Bukit Biru, Kelurahan Jahab, dan Kelurahan Loa Ipuh Darat. Keem-

pat kelurahan ini terletak cukup jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit Tenggarong Seberang. Dengan adanya mobil ambulans, diharapkan pelayanan medis darurat dapat ditingkatkan, dan pasien dapat segera diangkut ke rumah sakit.

Sukono juga menekankan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan ini akan menjadi tanggung jawab kelurahan dan desa yang menerimanya. Ini mencakup anggaran rutin dan tahunan untuk operasional, pemeliharaan, dan pembelian bahan bakar.

"Bantuan ini disambut dengan antusiasme oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Tenggarong, dan diharapkan akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk setempat," pungkasnya. **(Adv)**

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Camat Kota Bangun Darat, Julkifli. (Istimewa)

MTQ Tingkat Kabupaten ke-44 Kota Bangun Darat Digelar Bulan November Ini

TENGGARONG – Gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ke-44 akan digelar di Kecamatan Kota Bangun Darat. Diselenggarakan selama sepekan, pada tanggal 9-16 November 2023.

Jelang pelaksanaannya, pihak panitia ditingkat kabupaten dan kecamatan terus mematangkan segala persiapan. Mulai dari panggung, venue, pemondokan hingga pendataan kafilah dari 20 kecamatan.

Dikatakan oleh Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, saat ini pihak panitia di kecamatan dan kabupaten tengah melakukan verifikasi pemondokan. Dan, pendataan kafilah sendiri telah memasuki tahap finalisasi. Tinggal menunggu waktu sampai nantinya akan diumumkan hasilnya di ekspos MTQ, pada tanggal 2 November.

“Perlengkapan dari event organizer katanya akan memulai pemasangan di lapangan

pada tanggal 20 Oktober. Karena lokasinya MTQ ini akan berada lapangan sepak bola Desa Kota Bangun III,” ungkap Julkifli, Kamis (19/10/2023).

Julkifli berharap kehadiran MTQ di Kecamatan Kota Bangun Darat ini, dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Alquran. Bagaimana ayat-ayat suci di Alquran dapat dibumikan di kecamatan yang baru berumur tujuh bulan ini. Sehingga ketaqwaan kepada Allah juga dapat ditingkatkan.

“Di 10 hari pelaksanaan MTQ ini kami harap ada peningkatan di ekonomi masyarakat. Kita juga berharap infrastruktur kami jadi perhatian, karena masih baru dan perlu perbaikan yang harus dilakukan secara cepat. Guna menunjang pelayanan publik,” tutup Julkifli. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



KEWENANGAN SMA/SMK DI PROVINSI, DISDIKBUD TAK BISA UKUR ANGKA PUTUS SEKOLAH

BACA HALAMAN A2

**DPMPTSP Edukasi Warga
Pentingnya Miliki Izin Usaha**





Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan. (Yusva Alam)

Kewenangan SMA/SMK di Provinsi, Disdikbud Tak Bisa Ukur Angka Putus Sekolah

BONTANG – Usulan untuk mendesak pemerintah pusat agar kewenangan SMA/SMK dikembalikan ke daerah kembali disuarakan Komisi I DPRD Bontang. Hal itu terungkap pasca Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking, salahsatu dampak buruknya kewenangan SMA/SMK berada di provinsi adalah pemerintah kota (pemkot) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tidak bisa lagi mengukur tingkat literasi dan angka putus sekolah.

Dikatakannya, untuk bisa mengukur tingkat literasi dan angka putus sekolah seharusnya sampai tingkat SMA/SMK. Karena kebijakan ini, maka dinas terkait hanya bisa mengukur sampai tingkat SD dan SMP saja.

"Kalau hanya mengukur SD dan SMP artinya tidak tuntas pengukuran tersebut. Sehingga sulit untuk jadi patokan," ujarnya saat diwawancara redaksi usai rapat kerja bersama Disdikbud dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK).

Ditambahkannya, dalam pembahasan raperda terkait penyelenggara perpustakaan inipun, pihak-pihak terkait hanya bisa membahas penyelenggara perpustakaan di level SD dan SMP. Tidak bisa masuk ke ranah perpustakaan SMA/SMK.

"Yang masuk di ranah pembahasan adalah perpustakaan SD, SMP, OPD, dan masyarakat. Kita tidak bisa membantu perpustakaan SMA/SMK karena terhalang kebijakan tersebut," ungkapnya.

Karenanya pihaknya kembali menyuarakan agar Pemkot Bontang mendesak pemerintah pusat, untuk bisa mengembalikan SMA/SMK ke pemerintah daerah. (al/adv)



Rapat kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023. (Yusva Alam)

Dewan Pertanyakan Kenapa Ranah Event BCC di Disdikbud Bukan Dispopar? Ini Jawabannya!

BONTANG - Komisi I dan II DPRD Bontang mengadakan rapat kerja terkait event Bontang City Carnival (BCC) 2023, Senin (16/9/2023) di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang. Di rapat kali ini mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang.

Pimpinan rapat, Nursalam menjelaskan, bahwa di rapat kerja ini komisi I dan II ingin mempertanyakan mengapa anggaran BCC ini berada di Disdikbud, bukan di Dispopar yang seharusnya lebih sesuai untuk menyelenggarakan event tahunan ini, lantaran dinas yang bergerak di bidang pariwisata.

"Kalau menurut kami BCC itu berhubungan dengan pariwisata, karena mendatangkan orang-orang untuk melihat event tersebut.

Seharusnya ranahnya Dispopar karena bidang pariwisata, tetapi kok masuk di Disdikbud. Ini yang mau kami tanyakan," beber Nursalam.

Dijelaskan Salam sapaan akrabnya, berdasarkan penuturan Kadisdikbud, Bambang Cipto Mulyono, bahwa berdasarkan UU tentang kebudayaan yang ada, salahsatu item budaya adalah seni. Sementara BCC itu lebih menonjolkan budaya-budaya seni. Sehingga berdasarkan UU tersebut, ranah event BCC masuk di Disdikbud.

"Andaikan kita punya dinas sendiri khusus bidang pariwisata dan kebudayaan, maka ranah penyelenggara BCC harus di dinas tersebut. Kenapa di disdikbud? ya karena disana yang ada kebudayaannya saat ini," ungkap Anggota Komisi II DPRD Bontang itu. (al/adv)



Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan. (Yusva Alam)

Literasi Rendah, Pemkot Bakal Bikin Kebijakan Wajib Baca Buku

BONTANG – Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyelenggaraan perpustakaan, Pemkot Bontang berencana membuat kebijakan wajib baca 3 buku dalam setahun bagi murid-murid SD dan SMP.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Rancangan Peraturan daerah Bontang tentang penyelenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Pimpinan Rapat Kerja, Raking mengapa kebijakan wajib baca 3 buku setahun ingin dibuat. Hal itu untuk meningkatkan literasi bagi masyarakat Bontang, khususnya pelajar SD dan SMP.

Berdasarkan penuturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bambang Cipto Mulyono saat ini tingkat literasi Bontang masih di angka yang sangat rendah. Karena itu untuk meningkatkannya, salahsatu upaya yang akan dibuat ada membuat kebijakan wajib baca

3 buku setahun.

“Bahkan kata pak kadisdikbud tadi, negara kita juga berada di urutan nomor 2 terakhir untuk tingkat literasi. Itu artinya rendah sekali literasi masyarakat kita,” ujarnya.

Karenanya, dalam pembahasan raperda terkait penyelenggara perpustakaan tersebut, Kadisdikbud mendukung sanksi yang akan diberikan bagi yang tidak mematuhi kebijakan yang akan dibuat tersebut.

“Di rapat itu kami bahas sanksi apa yang akan diberikan? Kemudian buku-buku seperti apa yang wajib dibaca?,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang ini.

Menurutnya, kebijakan ini memang sudah seharusnya dibuat. Lantaran jangan sampai beda menteri beda lagi kurikulumnya, beda lagi kebijakannya. Dengan raperda ini, perubahan apapun di kementerian tidak akan merubah kebijakan wajib baca buku. (al/adv)



Pihak DPMPTSP saat memaparkan materi kepada peserta. (ist)

DPMPTSP Edukasi Warga Pentingnya Miliki Izin Usaha

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diundang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pelatihan keamanan pangan siap saji di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara.

Dalam kegiatan ini Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan menjadi narasumber untuk mengedukasi peserta yang hadir terkait pentingnya memiliki izin usaha.

"Karena ini tentang pangan siap saji yang merupakan usaha masyarakat, tentu kami akan beritahu mereka tidak hanya berbisnis saja, tapi juga mendapatkan legalitas dalam bisnisnya," jelasnya saat ditemui, Rabu (18/10/23).

Adapun 5 alasan penting memiliki izin usaha. Pertama, usaha yang memiliki izin mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan dari pe-

merintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kedua, usaha yang memiliki izin lengkap dan sah akan mendapatkan kemudahan dan pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha.

Kemudian ketiga, akan lebih mudah ikut serta dalam tender. Keempat, usaha lokal yang memiliki izin mendapat kesempatan mengembangkan usahanya ke tingkat internasional. Terakhir, kredibilitas usaha akan baik dan semakin mudah untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan pemerintah.

"Tentu bakalan banyak keuntungan kalau usaha kita sudah memiliki izin, yang paling terasa pasti adanya kekuatan hukum, karena dengan hukum kita bisa menjaga usaha tetap pada ranahnya," ujarnya.

Adapun usaha berbasis resiko yang harus diketahui agar masyarakat yang ingin membuka usaha mengetahui resiko dari usahanya. (sya/adv)



Ilustrasi (Ist)

UMKM dengan Jenis Usaha Berbasis Risiko Rendah Mendominasi di Bontang

BONTANG - Setiap pembuatan usaha akan terdapat kategori usaha berbasis resiko rendah hingga resiko tinggi. Oleh sebab itu verifikasi izin usaha juga akan berbeda-beda kepengurusannya.

Untuk usaha dengan tingkat resiko rendah pemilik usaha hanya butuh mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian untuk usaha beresiko menengah rendah membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) yang hanya pernyataan mandiri.

Ketiga, usaha beresiko menengah tinggi yang memerlukan NIB dan SS yang harus menggunakan pernyataan mandiri kemudian diverifikasi lembaga pemerintahan daerah. Terakhir adalah usaha beresiko tinggi dengan memerlukan NIB melalui verifikasi melalui kementerian atau lembaga, atau pemerintah daerah beserta SS jika diperlukan.

“Makin tinggi resiko usaha makin banyak verifikasi yang harus dilakukan,” jelas Jabatan Fungsional (Jabfung)

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPSTSP Bontang, Natalia Santi Kanan.

Di Bontang terdapat 15.563 sebaran proyek usaha dengan tingkat resiko yang berbeda-beda. Pertama, 10.256 dengan usaha beresiko rendah biasanya ini adalah UMKM. Kedua, 3.180 dengan usaha menengah tinggi seperti usaha konstruksi.

Ketiga, 1.317 dengan usaha beresiko menengah rendah hampir mirip dengan menengah tinggi, namun surat pernyataan tidak memerlukan verifikasi. Terdapat pula 810 usaha dengan resiko tinggi seperti apotik yang memiliki apoteker harus bersertifikasi.

“Jadi sambil persiapan mengurus sewa toko, pegawai, kontrak supplier, mengurus izin apotek ke kemenkes, kalau sudah keluar baru bisa berjalan,” ujarnya.

Data ini dikeluarkan oleh Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sejak 4 Agustus 2021 hingga saat ini. (adv/sya)



SERAP ASPIRASI MASYARAKAT KAMPUNG SEI BEBANIR BANGUN, INI USULAN MASYARAKAT YANG DIKANTONGI MADRI



**KASUS ISPA DI BERAU TINGGI,
PERI MINTA JANGAN DIBIARKAN
BERLARUT-LARUT**



Suasana reses Ketua DPRD Berau, Madri Pani di Kampung Sei Bebanir Bangun.

SERAP ASPIRASI MASYARAKAT KAMPUNG SEI BEBANIR BANGUN, INI USULAN MASYARAKAT YANG DIKANTONGI MADRI

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani melaksanakan reses III di Kampung Sei Bebanir Bangun, Rabu (18/10/2023) lalu.

Dia menuturkan, aspirasi masyarakat yang diterima dirinya yakni pembangunan Puskesmas yang dapat melayani masyarakat dalam 24 jam.

"Mengenai usulan itu, saya akomodir dulu. Ketua RT juga saya minta membuat perencanaan mengenai lahan yang akan digunakan, serta berita acara bahwa masyarakat benar-benar membutuhkan Puskesmas 24 jam tersebut," ungkapnya.

Dipaparkannya, selain permintaan pembangunan Puskesmas 24 jam, masyarakat Kampung Sei Bebanir Bangun juga mengusulkan jalan umum, kebutuhan kelompok tani dan nelayan serta pembangunan jalan usaha tani.

Menanggapi permintaan warga Kampung Sei Bebanir Bangun tersebut, Madri Pani men-

gaku akan berupaya merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Bahkan di tahun ini ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk masyarakat Kampung Sei Bebanir Bangun, diantaranya peningkatan Jalan Dermaga dan Jalan Pendidikan yang akan dikerjakan pada bulan November hingga Desember 2023," bebernya.

Selain itu, kata dia, ada juga bantuan ketinting untuk 5 kelompok nelayan, seperti kelompok nelayan Bangun Jaya, Bangun Makmur, Sinar Raut, Saturut dan Batiwakkal.

Kendati demikian, untuk usulan lainnya yang bersifat mendesak, kata Madri Pani bakal diupayakan bisa terealisasi.

"Akan saya realisasikan jika memang hal itu sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk peningkatan Jalan umum, pembangunan jalan usaha tani dan bantuan ketinting," pungkasnya.

(adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Suasana reses Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah di Kelurahan Gayam.

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR MENDOMINASI DALAM RESES SYARIFATUL DI KELURAHAN GAYAM

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah melakukan reses III di Kelurahan Gayam pada Rabu (18/10/2023) lalu.

Ia mengungkapkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat yakni peningkatan drainase, pelebaran jalan, lampu penerangan jalan, alat kelengkapan posyandu, bantuan untuk UMKM serta alat kelengkapan pencegahan kebakaran.

"Usulannya banyak, tentu kita sesuaikan mana yang masuk dalam skala prioritas. Kalau mengenai posyandu, mungkin bisa saya penuhi dari biaya sendiri," katanya.

Mengenai peningkatan jalan dan drainase, Syarifatul menyebut akan mengupayakannya dalam pembahasan DPRD nanti.

"Apalagi di RT 1 itu sudah lama tidak tersentuh untuk peningkatan, sehingga memang harus dan layak diperjuangkan agar teralisasi," tegasnya.

Dirinya menyebut, RT 01 Kelurahan Gayam ini juga beberapa waktu lalu pernah memenang-

kan penghargaan sebagai Kelurahan dengan Dasawisma terbaik di provinsi Kaltim. Ini sudah sewajibnya harus mendapatkan dukungan peningkatan.

"Saya juga mengapresiasi ketu RT 01 yang aktif memberikan pembinaan kepada warganya hingga bisa berprestasi di tingkat provinsi. Ini jadi kebanggaan dan bisa jadi percontohan untuk yang lain," ucapnya.

Syarifatul berharap, sinergitas RT dan masyarakat bisa semakin baik, dan selaku perwakilan rakyat, dirinya menginginkan program yang ia salurkan bisa sesuai dengan kebutuhan dan benar-benar menyentuh masyarakat.

"Alhamdulillah program-program yang saya berikan selama ini sudah dirasakan oleh masyarakat, seperti program bedah rumah dan program lainnya. Saya harap saya bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat kedepannya," tandasnya. **(adv/set)**



RESES DI BALIKUKUP, INI USULAN MASYARAKAT KEPADA SAGA

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga melaksanakan reses di Pulau Balikukup pada Selasa (17/10/2023) lalu. Beberapa aspirasi dari masyarakat pun disampaikan kepada dirinya.

Dia memaparkan, aspirasi yang diterimanya yakni penggunaan Kompresor sebagai alat bantu tangkap ikan, bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masih menggunakan satu atap serta tidak terjamahnya internet di Kampung Balikukup.

"Selain itu, masyarakat juga mengajukan permohonan bantuan untuk majelis ta'lim, pemenuhan alat musik tradisional termasuk persoalan perijinan kapal yang dirasa cukup sulit," ungkapnya.

Dari keseluruhan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, dia menjelaskan terkait larangan menangkap ikan menggunakan kompresor, tidak hanya di Kampung Balikukup saja yang mengeluhkan, termasuk Derawan, Tanjung Batu dan lainnya.

"Untuk itu saya akan secepatnya berkoordinasi dengan pihak terkait supaya ada solusinya. Penggunaan kompresor sudah jadi tradisi nelayan jika dilarang tentu sangat berdampak pada mata pencaharian masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, merespons persoalan kurangnya sarpras pendidikan, khususnya PAUD, Saga mengaku, sudah dianggarkan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Berau dan nantinya akan diupayakan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah nantinya.



Suasana reses Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga di Pulau Balikukup.

"Beberapa bulan lalu saya sudah menganggarkan khusus untuk Taman Kanak-Kanak (TK) di kabupaten berau, nanti akan saya sisihkan untuk PAUD di sini," ujarnya.

Kemudian, keluhan masyarakat terkait persoalan perizinan kapal, dinilai cukup rumit dan tidak efektif selama ini. Pasalnya, sebelumnya masyarakat mengajukan cukup di tingkat kabupaten saja. Namun, saat ini adanya perubahan regulasi mengharus pemilik kapal mengurus izin ke pemerintah pusat.

"Saya akan coba berkordinasi dengan kementerian kelautan dalam waktu dekat ini. Memang anggota DPRD tidak punya wewenang merubah undang-undang yang ada, tapi akan saya usahakan bagaimana bentuk penyelesaiannya nanti," tuturnya.

Selain itu, masalah blank spot atau tidak adanya koneksi internet di kawasan perkampungan atau terpencil. Kata Saga, mestinya, masyarakat pedalaman tel-

ah merdeka sinyal, terlebih, hal ini tidak sejalan dengan salah satu program bupati yaitu pemasangan 1.000 titik WiFi.

"WiFi sudah terpasang, bahkan ada lima titik di Kampung Balikukup tapi semua tidak berfungsi sama sekali. Akan saya koordinasikan agar permasalahan jaringan seluler dan internet ini bisa secepatnya di atasi," tegasnya.

Di penghujung agenda reses, Saga menyampaikan, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan segera direalisasikan. Hanya saja, masyarakat diminta untuk bersabar dan memahami tentang mekanisme yang ada.

"Semua aspirasi yang ditampung akan saya kawal dan perjuangkan. Namun, ada proses dan tahap dan sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Saya harap masyarakat bisa mengerti dan bersabar sebentar sembari saya mendorong seluruh aspirasi yang di tampung," tutupnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

KASUS ISPA DI BERAU TINGGI, PERI MINTA JANGAN DIBIARKAN BERLARUT-LARUT

TANJUNG REDEB – Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Berau tengah mengalami lonjakan tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan (Dinkes), sepanjang Juni hingga Agustus 2023, ada 3020 masyarakat yang terjangkit.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menuturkan, pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut dengan peralatan medis yang memadai.

Ditegaskannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memastikan prioritas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terkena ISPA.

“Apalagi dalam kondisi kabut asap seperti ini. Dinkes saya harap memastikan seluruh peralatan medis memadai. Mulai dari oksigen, masker dan obat-obatan,” ungkapnya.

Buruknya kualitas udara di Bumi Batiwakkal, tentu membuat masyarakat merasakan sakit tenggorokan, pusing, batuk hingga sesak nafas. Kondisi tersebut, kata Peri, tentu dirasakan dan didominasi oleh anak-anak.

Hal itu diperkuat dengan data Dinkes Berau

mengenai pasien yang terjangkit. Yakni usia 1-5 tahun ada 985 kasus, 5-9 tahun 500 kasus, 9-60 tahun 1364 kasus dan usia rentan sebanyak 171 kasus.

“Jadi pihak puskesmas maupun rumah sakit harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berobat, terkhusus yang mengalami ISPA,” tuturnya.

“Jangan sampai ada kabar mengenai masyarakat yang datang untuk berobat tidak terlayani,” tegasnya.

Menurut Politikus Gerindra ini, kasus ISPA terjadi karena berbagai faktor. Dipaparkannya seperti adanya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), debu jalan serta asap kendaraan.

“Saya harap masyarakat jika keluar rumah mengenakan masker sebagai antisipasi ISPA ini,” imbuhnya.

Kendati demikian, Peri Kombong meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk cepat tanggap dalam kondisi saat ini akibat kabut asap. “Harus ada solusi untuk menurunkan angka kasus ISPA ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” tandasnya. (adv/set)



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

MINTA PEMERINTAH MAKSIMAL DUKUNG DUNIA LITERASI

TANJUNG REDEB – Dunia literasi sangat berpengaruh terhadap ilmu yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi mendorong eksekutif untuk memberi dukungan yang masif.

Dia menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus fokus kepada perkembangan literasi di Bumi Batiwakkal. Palsanya dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Literasi itu penting, apalagi kebodohan telah banyak memakan korban. Kita harus rajin baca buku, baik itu bentuk fisik maupun digital,” katanya.

Dirinya mengaku merasa prihatin. Sebab masih minimnya tenaga perpustakaan yang mengantongi akreditasi. Termasuk perpustakaan yang sudah berjenjang nasional.

“Hal itu saya ketahui setelah mendengar pemaparan Ketua Atpusi Berau, Mariani saat festival literasi beberapa waktu lalu,” ungkap pria yang

juga Ketua Gerakan Pemasarakatan Minat Baca (GPMB) Berau ini.

Ichsan menilai, pustakawan harus orang-orang yang profesional di bidangnya. Maka dari itu, kata dia, tenaga perpustakaan yang terakreditasi perlu ditingkatkan.

“Termasuk perpustakaan sekolah yang belum bertaraf nasional ini yang harus juga kita perhatikan, bagaimana langkahnya, paling tidak dengan menambah koleksi buku-buku baru dan terpopuler,” ungkapnya.

Agar keinginan tersebut tercapai, terangnya, diperlukan minat yang tinggi oleh anak didik. Untuk menariknya, perpustakaan harus modern.

“Jadi kita pancing dulu minatnya dengan edukasi yang bagus, ditambah fasilitas pendukung. Makanya perpustakaan juga harus bisa bertransformasi dengan lebih baik dan modern,” tutupnya.

(adv/set)



DIDUGA MESIN OVERHEAT, MOBIL SEDAN TERBAKAR DI MUARA RAPAK



**PERSIBA BERHASIL TAHAN
IMBANG PERSIPAL PALU**



Mobil sedan berwarna silver hangus terbakar di sekitar simpang Muara Rapak, Balikpapan Utara, pada Kamis (19/10).

DIDUGA MESIN OVERHEAT, MOBIL SEDAN TERBAKAR DI MUARA RAPAK

BALIKPAPAN - Sebuah kejadian mobil terbakar membuat panik sejumlah masyarakat yang berada di kawasan Simpang Rapak, Balikpapan Utara pada Kamis (19/10/2023) sekitar pukul 10.45 Wita. Semulanya kondisi lalu lintas yang padat pun menjadi longgar karena kejadian tersebut.

Mobil sedan berwarna silver dengan nomor polisi KT 5044 IS yang dikendarai Sudiono (64) tiba-tiba mengeluarkan api dan langsung membesar. Pengendara pun langsung menghindari mobil tersebut.

"Tiba-tiba panas dan langsung keluar api dari bagian depan itu," ujar Sudiono.

Ia menjelaskan, saat pergi dari rumahnya di Km 24 Kelurahan Karang Joang hingga berbelanja di pasar Pandan Sari, mobilnya tidak mengalami kendala akan terjadi sesuatu. Namun sesampainya di sekitar simpang

Muara Rapak, mobilnya terbakar.

"Saya dari pasar Pandan Sari belanja. Enggak ada apa-apa tadi. Semua normal aja. Sampai di sini tadi terbakar-nya," jelasnya.

Sudiono yang panik pun memilih menyelamatkan diri. Bahkan terlihat sejumlah warga berusaha memadamkan kobaran api dengan alat pemadam api ringan (Apar) namun tidak bisa memadamkan api tersebut.

"Dibantu sama pemadam tadi baru bisa mati apinya. Tadi sudah dicoba pake Apar tapi nggak bisa padam," tambahnya.

Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit lebih petugas BPBD Kota Balikpapan baru bisa memadamkan api hingga pendinginan. Dan sekitar pukul 11.40 Wita arus lalulintas pun sudah kembali normal kembali.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Pertandingan Liga2 antara Persipal Palu melawan Persiba Balikpapan yang berakhir dengan skor 2-2.

PERSIBA BERHASIL TAHAN IMBANG PERSIPAL PALU

BALIKPAPAN - Tim kesebelasan Persiba Balikpapan berhasil mencuri satu poin dari saat menghadapi Persipal Palu dalam lanjutan Liga2 di Stadion Gawalise, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (19/10/2023) sore.

Anak asuh Nil Maizar hingga akhir babak kedua mampu bermainimbang 2-2. Padahal untuk peluang menang harusnya bisa terjadi. Namun, karena banyak keputusan wasit yang kontroversi, maka membuat Persiba Balikpapan harus puas bermainimbang.

"Seharusnya kita menang. Tapi karena kondisi dan situasi ya mau bagaimana lagi. Cuma satu, dalam tanda kutip kepemimpinan wasit harus dievaluasi," ujar Nil Maizar usai pertandingan.

Tambahan satu poin ini membuat Persiba kini mengoleksi 5 poin, hasil dari satu kemenangan dan dua hasil seri. Tambahkan 1 poin sekaligus membuat Persiba naik satu strip ke posisi 6 klasemen sementara Grup 4 Liga 2.

"Pemain saya ini bekerja sangat luar biasa. Tampil spartan. Saya puas dengan permainan. Harusnya kita menang," jelasnya.

Pada pertandingan tersebut, Persiba Balikpapan sejatinya tampil cukup apik dan unggul lebih dulu lewat gol Fauqa pada menit 8. Persiba bahkan mampu

menambah keunggulan lewat gol Ardi Ardiana pada menit 17.

Tertinggal 2 gol, tuan rumah balik menekan dan mampu memperkecil ketinggalan dua menit berselang lewat gol yang dicetak Irvan Mofu.

Pada pertandingan ini, Irvan Mofu benar-benar menjadi momok lini belakang Persiba. Saat laga memasuki menit akhir, Irvan mencetal gol penyeimbang sekaligus membuyarkan kemenangan di depan mata Persiba.

"Kita syukuri aja hasil ini, dari pada kalah. Harusnya kita menang. Saya bangga dengan anak-anak, progresnya bagus dari 6 pertandingan ini," tambah Nil.

Meski demikian bukan berarti dirinya tak melakukan evaluasi usai pertandingan ini. "Tapi banyak evaluasi yang harus kita lakukan. Dari bertahan ke menyerang. Kita terus berjuang dan kerja keras agar tim ini lebih baik lagi ke depannya," tutupnya.

Sementara bagi tuan rumah, tambahan 1 poin membuat Persipal Palu gagal mengukudeta PSBS Biak dari pucuk klasemen. Persipal kini mengoleksi 9 poin, terpaut 1 poin dari PSBS Biak yang mengumpulkan 10 poin.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Minimarket Alfamidi Batuah, Balikpapan Utara, yang dirampok oleh dua orang pria dengan senjata tajam pada Rabu (18/10) sekitar pukul 22.30 WITA.

TODONGKAN SENJATA TAJAM, ALFAMIDI BATUAH DIRAMPOK, DUA PELAKU MELARIKAN DIRI

BALIKPAPAN - Para pekerja minimarket Alfamidi di Perum Pesona Bukit Batuah, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, histeris. Pasalnya, dua pria tak dikenal datang membawa senjata tajam saat para pekerja hendak menutup minimarket tersebut pada Rabu (18/10/2023) sekitar pukul 22.30 WITA.

Dua pelaku langsung memaksa masuk ke dalam Alfamidi dan menodongkan senjata tajam kepada para pekerja yang mayoritasnya perempuan. Pelaku pun meminta uang dari para pekerja sambil terus mengancam dengan senjata tajam.

Merasa terancam, pelaku pun berhasil mengambil sejumlah uang. Namun, para pekerja yang ketakutan lantas berteriak histeris dan menangis. Teriakan para pekerja pun terdengar oleh warga sekitar.

"Ada warga yang mendengar teriakan dari karyawan di sini, lalu semuanya datang kesini. Saya juga datang. Nah, katanya ada pencuri di dalam, ketika karyawan masih berada di dalam," ujar Bambang, warga Perum Pesona Bukit Batuah.

Merasa sudah terkepung oleh warga, pelaku pun sengaja mematikan lampu untuk mengelabui warga. Setelah mengetahui bahwa pelaku membawa senjata tajam, warga pun mengambil balok kayu serta batu untuk berjaga-jaga.

Selang beberapa menit, terdengar suara benda jatuh dari samping. Rupanya salah seorang pelaku nekat melompat dari lantai

dua dan berhasil melarikan diri ke semak-semak yang ada di belakang Alfamidi tersebut.

"Kami semua berada di luar untuk menjaga, ingin mencoba masuk, ternyata yang satu itu melompat dari lantai dua dan kabur ke hutan-hutan di sana. Nah, satu lagi masih ada di dalam," tambah Opri, Ketua RT 72 Batuah.

Warga pun mengejar pelaku yang melarikan diri ke hutan tersebut. Namun, tak berselang lama, pelaku kedua nekat merobos kepungan warga yang berjaga di pintu depan Alfamidi sambil mengacungkan senjata tajam. Warga yang terkejut melihat pelaku keluar sambil membawa senjata tajam tersebut tak berhasil menangkap pelaku.

"Dia keluar langsung lari dan membawa senjata tajam, warga ini sudah membawa balok kayu tapi masih berhasil kabur dia. Warga tidak ada yang berani karena membawa senjata tajam," jelas Opri.

Warga pun langsung mengejar pelaku kedua, namun lagi-lagi pelaku berhasil melarikan diri dengan kecepatan lari yang tinggi. Para pekerja yang mengalami kejadian itu pun merasa trauma dan menangis.

Beberapa saat kemudian, jajaran Polsek Balikpapan Utara hingga Jatanras Polda Kaltim tiba di lokasi kejadian. Sejumlah barang bukti pun dikumpulkan serta mereka meminta keterangan para saksi, termasuk para karyawan yang menjadi korban. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Lima juri mengajukan pertanyaan kepada peserta. Kajati Kaltim, Hari Setiyono (pegang mic) menjadi satu dari lima juri tersebut.

GRAND FINAL DPSH 2023, JARING PELAJAR BERPRESTASI DAN BERKOMPETEN DI KALTIM

BALIKPAPAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, Hari Setiyono menjadi satu dari lima juri pada pelaksanaan Grand Final Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum (DPSH) 2023 yang digelar di Balikpapan, Kamis (19/10/2023).

Kehadiran Hari memunculkan semangat berganda bagi peserta yang masuk ke babak grand final tersebut. Maklum, di tiga edisi DPSH sebelumnya, baru kali ini Kajati Kaltim yang langsung ikut memberikan penilaian.

Pada Grand Final DPSH tersebut, tiga peserta terbaik terpilih dari puluhan peserta lainnya. Tiga peserta itu adalah SMAN 1 Long Ikis, Kabupaten Paser atas nama Amin Fatku Rohman dan Innaysila Trimaulidina Aziz; SMAN 3 Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rafi Pramana Puta dan Meylisa Hadi Yanti; dan terakhir perwakilan SMAN 1 Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur (Kutim) atas nama Huakbar Priyanti Putra dan Atikah Rahma Dita.

Dalam babak grand final ini, masing-masing peserta diberikan waktu beberapa menit untuk menyampaikan argumentasinya terkait materi yang dipilih secara acak. Terdapat tiga materi yang disiapkan panitia, antara lain kekerasan seksual terhadap anak, kebebasan berpendapat dalam bingkai kebhinekaan, dan penerapan restorative justice.

Setelah pemaparan oleh masing-

masing peserta, dilanjutkan tanya jawab oleh lima juri. Selain Kajati Kaltim Hari Setiyono, empat juri lainnya yang berkesempatan mengajukan bertinteraksi dengan peserta. Yakni, Asisten Intel Kejati Kaltim I Ketut Kasna Dedi, Yekti Utami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Wiwid Marhaendra Wijaya dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, dan Nur Arifuddin dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul).

Berbagai pertanyaan dilontarkan para dewan juri. Meski begitu, ketiga peserta tampak begitu tangkas dan cakap menjawab pertanyaan sesuai durasi waktu yang disediakan panitia. Di sesi ini tampak mereka yang masuk ke babak grand final memang sudah melalui proses penjurian dan seleksi yang begitu ketat.

Meski masih di level bangku SMA/ sederajat, tidak adar rasa canggung bagi setiap peserta saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juri. Di atas panggung mewah di Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, ketiga peserta memperlihatkan kemampuan terbaiknya dalam membangun argumentasi dan narasi tentang hukum.

Kajati Kaltim Hari Setiyono, lebih banyak memberikan wejangan kepada generasi muda unggul tersebut. Sementara Asisten Intel Kejati Kaltim I Ketut Kasna Dedi

menguji pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap undang-undang yang berlaku dari setiap tema yang disampaikan. Adapun juri dari perwakilan PWI, Disdikbud dan Unmul, mengajukan pertanyaan untuk mempertajam setiap tema yang dibicarakan.

DPSH 2023 merupakan gelaran ketiga, sejak dimulai pada 2020 silam. Mereka yang berlaga di DPSH tingkat Kaltim ini adalah peserta terbaik pertama, kedua dan ketiga dari masing-masing kabupaten/kota. Artinya, terdapat 30 peserta dari 10 kabupaten/kota yang berlaga di ajang DPSH 2023.

Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (16/10/2023), dimulai dengan pemaparan best practice oleh 30 peserta. Mereka dibagi ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdapat 10 peserta. Di sesi ini, terdapat tiga juri di masing-masing kelompok yang memberikan penilaian. Ketiga juri itu berasal dari unsur, Kejati, Umul dan PWI.

Dari unsur Kejati Kaltim adalah Asisten Pidum Sugih Carvallo; Asisten Pengawasan Sigid J Pribadi; Koordinator Kejati Kaltim Ristu Darmawan. Dari unsur Fakultas Hukum Unmul: Lily Triyana, Griezelda dan Agustina Wati. Adapun dari unsur PWI Kaltim adalah Abdurrahman Amin, Muhammad Haldiyanur; dan Ismail HZ.

Dari setiap kelompok kemudian terpilih dua peserta terbaik.

Lanjutan Grand Final

Di hari berikutnya, enam peserta dari masing-masing kelompok ini kemudian beradu di sesi debat. Mereka dibagi kembali ke dalam tiga kelompok debat. Artinya, setiap kelompok melakukan duel debat. Lagi-lagi tiga kelompok juri sebelumnya yang melakukan penilaian di sesi best practice kembali melakukan penilaian di setiap kelompok debat ini.

Dari tiga kelompok debat, dipilih satu pemenang yang kemudian berlaga di panggung grand final. Lima juri yang mentas di grand final merupakan wajah baru yang tidak terlibat dalam penilaian di dua sesi sebelumnya.

"Mereka yang tampil di grand final akan menentukan juara I, II dan III. Sementara mereka yang tersisih di sesi debat akan diranking untuk menentukan juara harapan I, II dan III," kata Ketua Panitia Pelaksana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Sugianto.

DPSH Kaltim 2023 digelar setiap tahun yang dimulai pada 2020 silam. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Disdikub Kaltim dan Kejati Kaltim. Untuk menjangkau peserta yang berlaga

di tingkat Kaltim, sebelumnya dilakukan seleksi serupa di 10 kabupaten/kota. Di level ini, setiap Kejari terlibat langsung dalam proses seleksi. Karena itu, mereka yang berlaga di tingkat Kaltim ini kemudian didampingi oleh satu guru pembimbing dan satu perwakilan Asisten Intel di setiap Kejari.

Pada pembukaan, Kajati Kaltim Hari Setiyono menyampaikan pelaksanaan Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Tingkat SMA/SMK/MA/ ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan lainnya agar potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.

"Dan yang lebih penting menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab," katanya.

Salah satu ciri warga negara yang bertanggung jawab, pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus dikembangkan potensinya ke arah yang positif. Caranya

dengan diberikan pemahaman hukum melalui pembinaan atau pembentukan pelajar sadar hukum.

Kegiatan ini, lanjut Kajati, secara tidak langsung membentuk karakter pelajar terkait hukum, yakni kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, peduli pada lingkungan dan sosial, serta dapat bertindak lebih bijak dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Sudah seharusnya kita secara dini mempersiapkan pelajar sebagai penerus bangsa, sehingga ke depannya siap dan berkompeten guna menghadapi tantangan yang ada," kata Hari Setiyono.

Sementara itu, Plh Kepala Disdikub Kaltim Robiana Hastawulan menyampaikan bahwa pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan dengan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai kesadaran hukum.

"Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada kepala sekolah dan guru agar dapat membimbing peserta didik lebih taat dan sadar akan hukum yang berlaku," tukasnya. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI JUMAT
20 OKT 2023



MENANTI PENUTUPAN AKTIVITAS PT SARASWANTI SAWIT MAKMUR

**WARGA PATOK SISI JALAN, KADES
SENAKEN SIAP CABUT JIKA MASUK
WILAYAHNYA**





Lokasi perkebunan milik PT SSM

MENANTI PENUTUPAN AKTIVITAS PT SARASWANTI SAWIT MAKMUR

PASER - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser agar menutup aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan sawit milik PT Saraswanti Sawit Makmur (SSM).

Desakan penutupan ini harus segera dilakukan jika pihak perusahaan tidak melakukan perbaikan ekosistem dampak dari pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan.

"Jika hingga akhir Oktober ini tidak diselesaikan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat beberapa waktu lalu, perusahaan akan ditutup sementara," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansur, Rabu (18/10/2023).

Diketahui, perusahaan yang berlokasi di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau dan Desa Tanjung Pinang, Kecamatan

Muara Samu ini, diduga melakukan pencemaran lingkungan di daerah aliran sungai. Peristiwa ini terjadi setidaknya 2 kali.

Dari dugaan pencemaran lingkungan ini, terbukti bahwa perusahaan perkebunan yang berdiri sejak 2003 itu, menyebabkan sungai tercemar hingga berdampak pada makhluk hidup yang mati di sungai setempat.

Pencemaran itu tak lain bersumber dari kolam ilegal milik perusahaan yang berfungsi menampung air dari saluran lindi. Sebelumnya, akibat dugaan itu, antara pihak perusahaan dengan Pemerintah setempat.

Di antaranya Kecamatan Batu Engau, Pemerintah Desa (Pemdes) Kerang Dayo, Pemdes Langgai serta masyarakat Desa Kerang Dayo. Dari hasil pertemuan itu, pihak perusahaan berjanji akan menindaklanjuti daftar kebutuhan/usulan dari para pihak.

"Berdasarkan berita acara kes-

epakatan bersama dengan pemerintah daerah pada 21 Agustus lalu, pihak perusahaan juga harus menunaikan tanggungjawab sosialnya akibat pencemaran lingkungan itu," kata Basri.

Ia menegaskan, pihak perusahaan harus merehabilitasi ekosistem dan mengakomodir permintaan masyarakat yang terkena dampak. Basri juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser untuk aktif mengecek kualitas air sungai.

"Kami minta pengawasannya melibatkan masyarakat," katanya.

Akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan itu, air di sungai tidak dapat dikonsumsi masyarakat setempat. Dalam upaya pemulihan fungsi lingkungan, kata Basri, pihak perusahaan harus melakukan tahapan pembersihan unsur pencemaran.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



OPD terkait saat meninjau lokasi patok klaim warga

WARGA PATOK SISI JALAN, KADES SENAKEN SIAP CABUT JIKA MASUK WILAYAHNYA

PASER - Jalan MT Haryono, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot kini ramai jadi perbincangan. Pasalnya, seorang warga menutup bahu jalan menggunakan tiang kayu setinggi 4 meter, sejak Senin (16/10/2023) lalu.

Hal itu diduga lantaran warga tersebut mengklaim kepemilikan tanah dari sisi badan jalan, termasuk beberapa bangunan yang dekat dengan jalan tersebut. Akibat pematokan jalan itu, aktivitas pengendara yang melintas terganggu.

Kepala Desa (Kades) Senaken, Supriyadi menyatakan, mulanya warga tersebut membersihkan area setempat. Namun tak lama dilakukan pemasangan tiang dan diklaim sebagai miliknya. Peristiwa ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.

"Warga itu mengaku tanah yang di area tersebut semua adalah miliknya. Termasuk sisi jalan dan tanah di atas bangunan milik tetangganya," kata Supriyadi, saat dikonfirmasi, Kamis (19/10/2023).

Supriyadi menyebut, tetangga warga yang memasang tiang tersebut merasa dirugikan dan melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian Resort (Polres) Paser agar mendapat kejelasan hukum atas tindakannya.

Kendati begitu, sebelumnya persoalan

tersebut sudah diadukan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Pihak kepolisian, dijelaskan Supriyadi, sudah pernah memediasi masalah tersebut, namun tidak masing-masing tidak bersepakat.

"Sudah dilaporkan ke polisi, dilaporkan sama tetangganya juga," katanya.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah meninjau lokasi untuk penyelesaian masalah tersebut. Supriyadi mengatakan, penyelesaian ini diupayakan selesai secara persuasif oleh Kecamatan dan OPD terkait.

"Kami secara bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan persuasif dengan pihak terkait," Supriyadi.

Ia turut mengimbau agar para pihak tidak bertindak lebih selama persoalan ini di ranah pihak terkait untuk diselesaikan. Sementara itu, belum diketahui secara pasti terkait batas lokasi tersebut, lantaran beberapa kalangan menyebut lokasi tersebut masuk Kelurahan Tanah Grogot.

"Ini belum pasti juga apakah masuk Grogot atau Senaken. Sebenarnya kalau sudah masuk Senaken, saya akan cabut itu. Karena mengganggu aktivitas warga jadinya. Ini kan jalan ramai dilintasi," pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari



Para finalis Duta Olahraga Kabupaten Paser 2023

PASER KINI MILIKI DUTA OLAHRAGA, DITARGET LOLOS TINGKAT PROVINSI

PASER - Atlet Takraw Putra, Bachryan Kiki Saputra (18) dan Atlet Menembak Putri, Sakinah Fitriah Sulzy Ramadhania (19) akhirnya terpilih sebagai sebagai Duta Olahraga Kabupaten Paser 2023, di Hotel Bumi Paser, Rabu (18/10/2023).

Terpilihnya kedua putra-putri Kabupaten Paser ini, setelah sebelumnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser melakukan pemilihan Duta Olahraga berdasarkan penjurian yang dilakukan kepada 13 atlet yang terdiri dari 7 perempuan dan 6 laki-laki.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disporapar Kabupaten Paser, Arif Rahman menyatakan, pemilihan ini setelah belasan atlet itu menjalani masa karantina pada pemilihan Duta Olahraga Paser 2023 dalam pembekalan berbagai materi tentang keolahragaan dan pengembangan diri.

"Tentunya momen penting ini untuk menggali betapa besarnya potensi anak muda di bidang olahraga, sehingga terpilih 2 dari belasan atlet ini sebagai duta olahraga," kata Arif.

Ia berpesan agar bisa sukses ke depannya,

kuncinya terus menggali potensi, bakat dan kreativitas generasi muda. Meski dengan waktu yang singkat, kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan sukses

"Diharapkan duta olahraga yang terpilih pada malam hari ini dapat mewakili Paser di tingkat Provinsi mendatang," lanjutnya.

Sementara itu, Kwtua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Paser, Totok Sumardiono, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan bahwa kompetensi olahraga khususnya olahraga prestasi akan maju.

"Ini merupakan cara untuk merespon atau paling tidak merangsang para atlet untuk lebih semangat lagi dalam mempersiapkan Porprov Kaltim 2026," kata Totok.

Untuk diketahui, Duta Olahraga ini salah satunya untuk menyukseskan program jangka panjang nasional 2021-2045, yaitu Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Selain itu untuk memahami birokrasi di pengcab dan sampai ke pemerintah.

Pewartanya : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI JUMAT
20 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



KEJARI SAMARINDA TERIMA PELIMPAHAN TPPU SENILAI RP2 MILIAR

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG





Proses penyerahan barang bukti TPPU dari BNNP Kaltim kepada Kejari Samarinda, Rabu (18/10/2023).

KEJARI SAMARINDA TERIMA PELIMPAHAN TPPU SENILAI RP2 MILIAR

SAMARINDA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp2 miliar dari penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) setempat dengan tersangka berinisial F.

"F disangka melakukan dugaan TPPU dengan tindak pidana asal (predicate crime) narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU," kata Kepala Kejari Samarinda Firmansyah Subhan.

Firmansyah didampingi Kasi Intel Kejari Samarinda Erfandy Rusdy Quiliem melanjutkan, sebelumnya tersangka merupakan narapidana narkoba dengan masa hukuman penjara 10 tahun, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 752/Pid.sus/2016/PN.Smr tanggal 23 November 2016.

Saat menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas II Sempaja Samarinda, tersangka tetap dapat menjalankan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi/inex dengan cara mengecor sabu-sabu di dalam rutan sejak tahun 2020 sampai 2023.

Selanjutnya uang hasil penjualan narkoba

tersebut, dikirimkan oleh tersangka baik ke rekening bank atas nama tersangka maupun rekening atas nama orang lain.

"Uang hasil penjualan narkoba kemudian digunakan tersangka untuk membeli barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah dan kendaraan bermotor, tujuannya adalah untuk menyamarkan asal usul uang," ujarnya.

Adapun barang bukti yang telah disita dan diserahkan oleh penyidik BNNP Kalimantan Timur kepada Jaksa Penuntut Umum di tahap dua ini adalah uang tunai senilai Rp1 miliar, ada pula uang tunai Rp1,07 miliar.

Kemudian dua kartu ATM, satu buku rekening, satu unit kendaraan roda dua Jupiter MX hitam, STNK, BPKB, satu unit HP Galaxy J2 putih, satu unit HP A37 rose gold, dua bidang tanah dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan di Jalan M Said Samarinda.

"Jaksa Penuntut Umum Kejari Samarinda yang menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) TPPU dari BNNP Kalimantan Timur hari ini adalah Jaksa Sabar Evryanto Batubara, SH, M.H," tutur Erfandy. (ANT/MK)



Pemain Borneo FC Fajar Fathur Rahman, Stefano Lilipaly dan Diego Michiels usai merayakan kemenangan.

BORNEO FC DAPAT TAMBAHAN KEKUATAN JELANG HADAPI PERSIB BANDUNG

JAKARTA - Borneo FC mendapatkan tambahan kekuatan jelang laga menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-17 Liga 1 Indonesia di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (22/10).

Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Kamis, diketahui dua pemain yaitu bek sayap Diego Michiels dan gelandang Kei Hirose sudah bisa kembali membela Borneo FC.

Hal ini disyukuri oleh pelatih Borneo FC Pieter Huistra yang menjelaskan keduanya memiliki peluang besar untuk dimainkan pada pertandingan nanti setelah sebelumnya sempat berkulat dengan cedera.

"Kei sudah ditangani oleh pelatih fisik. Tinggal dipulihkan agility dan speed-nya. Kalau sudah dapat lampu hijau dari pelatih fisik, dia bisa bergabung dengan latihan tim," ungkap Pieter.

"Begitu juga Diego. Untuk dua pemain ini, diperkirakan siap untuk tampil menghadapi pertandingan terdekat," sambung pelatih asal Belanda tersebut.

Kei Hirose sudah mengalami cedera sejak pertandingan melawan Madura United, sedangkan Diego Michiels sama sekali tak dimainkan pada pekan lalu kontra Arema FC.

Kehadiran Hirose dan Diego Michiels akan menjadi modal berharga untuk Borneo FC yang berambisi mengamankan posisi puncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia.

Kini Stefano Lilipaly serta kolega menempati posisi pertama dengan

raihan 31 poin dari 15 pertandingan, berjarak empat poin dari Persib Bandung di peringkat ketiga.

Sementara itu, penyerang asal Argentina Felipe Cadenazzi masih harus absen ketika Pesut Etam menjamu Persib Bandung karena masih menjalani pemulihan cedera hamstring.

Cadenazzi mendapatkan cedera tersebut pada pertandingan pekan ke-15 menghadapi Arema FC, namun Huistra memastikan cedera yang dialami pemainnya itu tidak parah.

"Kemungkinan dia membutuhkan waktu dua hingga tiga pekan untuk bisa pulih. Bukan cedera yang parah. Tetapi proses pemulihannya memang tidak sebentar," jelas Pieter. (ANT/MK) Borneo FC Dapat Tambahan Kekuatan Jelang Hadapi Persib Bandung

JAKARTA - Borneo FC mendapatkan tambahan kekuatan jelang laga menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-17 Liga 1 Indonesia di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (22/10).

Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Kamis, diketahui dua pemain yaitu bek sayap Diego Michiels dan gelandang Kei Hirose sudah bisa kembali membela Borneo FC.

Hal ini disyukuri oleh pelatih Borneo FC Pieter Huistra yang menjelaskan keduanya memiliki peluang besar untuk dimainkan pada pertandingan nanti setelah sebelumnya sempat berkulat dengan cedera.

"Kei sudah ditangani oleh pelatih fisik. Tinggal dipulihkan agility

dan speed-nya. Kalau sudah dapat lampu hijau dari pelatih fisik, dia bisa bergabung dengan latihan tim," ungkap Pieter.

"Begitu juga Diego. Untuk dua pemain ini, diperkirakan siap untuk tampil menghadapi pertandingan terdekat," sambung pelatih asal Belanda tersebut.

Kei Hirose sudah mengalami cedera sejak pertandingan melawan Madura United, sedangkan Diego Michiels sama sekali tak dimainkan pada pekan lalu kontra Arema FC

Kehadiran Hirose dan Diego Michiels akan menjadi modal berharga untuk Borneo FC yang berambisi mengamankan posisi puncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia.

Kini Stefano Lilipaly serta kolega menempati posisi pertama dengan raihan 31 poin dari 15 pertandingan, berjarak empat poin dari Persib Bandung di peringkat ketiga.

Sementara itu, penyerang asal Argentina Felipe Cadenazzi masih harus absen ketika Pesut Etam menjamu Persib Bandung karena masih menjalani pemulihan cedera hamstring.

Cadenazzi mendapatkan cedera tersebut pada pertandingan pekan ke-15 menghadapi Arema FC, namun Huistra memastikan cedera yang dialami pemainnya itu tidak parah.

"Kemungkinan dia membutuhkan waktu dua hingga tiga pekan untuk bisa pulih. Bukan cedera yang parah. Tetapi proses pemulihannya memang tidak sebentar," jelas Pieter. (ANT/MK)



Kepala DLH Kaltim, Encek Achmad Rafiddin Rizal bersama perwakilan sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

57 SEKOLAH DI KALTIM TERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA DARI KLHK

SAMARINDA - Sebanyak 57 sekolah dari kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Encek Achmad Rafiddin Rizal menjelaskan dari total 57 penghargaan tersebut terdiri dari 20 sekolah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Mandiri dan 37 sekolah lainnya mendapatkan Adiwiyata Tingkat Nasional.

Penghargaan Adiwiyata diserahkan secara langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Senayan – Jakarta.

“Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan langsung penghargaan Adiwiyata Mandiri kepada 134 sekolah dan Adiwiyata Nasional kepada 417 sekolah,” kata Rizal dalam keterangan di Samarinda, Rabu.

Rizal menjelaskan penghargaan Adiwiyata diberikan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS (peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah), yaitu aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan per-

ilaku ramah lingkungan hidup

Tahapan penghargaan Adiwiyata ada empat tingkatan, yaitu tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan yang tertinggi adalah tingkat Mandiri.

Pada tahun 2023 ini, lanjut Rizal pihaknya mengusulkan sebanyak 78 Calon Sekolah Adiwiyata yang terdiri dari 26 Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM) dan 52 Calon Sekolah Adiwiyata Nasional (CSAN) dari delapan wilayah kabupaten/kota di Kaltim, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), Berau, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.

“Dari usulan itu, 73 persen usulan Kaltim berhasil memperoleh Penghargaan Adiwiyata yang terdiri dari 37 Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan 20 Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri,” jelas Rizal.

Pada ajang Penghargaan Adiwiyata Nasional itu, Kaltim berhasil memperoleh peringkat ke 5 dan Balikpapan pada peringkat ke 2 sebagai kabupaten/kota dengan Sekolah Adiwiyata terbanyak se-Indonesia.

Sementara bagi PPU dan Kukar, ini merupakan pertama kalinya sekolah usulan berhasil memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri.

Lebih lanjut, Rizal menyebut pihaknya akan mengusulkan penye-

lenggarakan penyerahan kembali Tropi dan Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri dan Nasional yang diserahkan oleh Pj Gubernur Kaltim, Sekda, dan jajaran Asisten Setdaprov Kaltim kepada seluruh sekolah peraih Adiwiyata Nasional dan mandiri.

“Karena ini merupakan prestasi luar biasa yang patut kita apresiasi. Mengingat pada tahun 2022 lalu, perolehan penghargaan hanya 22 Sekolah Adiwiyata Nasional dan 9 Sekolah Adiwiyata Mandiri. Sekarang, sebanyak 57 Sekolah menerima penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri,” terangnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini ada sebanyak 1.478 Sekolah Adiwiyata yang telah berhasil dicetak oleh Provinsi Kaltim mulai tahun 2008 - 2023.

Tetapi bila dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di Kaltim sebanyak 3.517 sekolah, maka capaian Sekolah Adiwiyata masih belum maksimal. Dengan capaian sebesar 42 persen dari keseluruhan sekolah di Kalimantan Timur.

DLH Kaltim terus berkomitmen meningkatkan capaian Sekolah Adiwiyata di Bumi Etam agar melahirkan generasi yang lebih peduli dan berbudaya lingkungan. Sehingga, tercipta lingkungan yang lebih sehat dan lestari. (ANT/MK)